

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur)**

Ahmad Kudhori¹⁾

¹⁾ Dosen Akademi Manajemen Koperasi Tantular Madiun

Abstract

This study aimed to analyze the effect of the financial performance of local governments to the allocation of capital expenditure in the local government district/city in East Java is based on the ratio of the degree of decentralization, effectiveness ratio, self-reliance ratio and capital expenditure ratio. This study is the sample, with a population of local governments in the province of East Java, which is composed of 38 districts/cities. The data used are secondary data, namely the local government finance report in 2012 which has been audited by the BPK via BPK official website. The analysis technique used in this study is the use of financial ratio analysis and sample selection using purposive sampling method, to test the classical assumption of normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test and autocorrelation test. To facilitate statistical calculations, the researchers used tools SPSS for Windows version 17.0. The results of this study indicate that the financial performance consisting of the degree of decentralization, effectiveness and financial independence PAD simultaneously and partially significant effect on the allocation of capital expenditures. Adjusted R^2 value of 0,658 indicates that it amounted to 65,80% of the variation in the allocation of capital expenditures can be explained by the variables of fiscal decentralization, the effectiveness of PAD and financial independence, while 34,20% is explained by other variables not included in this study

Keywords : Degree of Decentralization, Effectiveness PAD, Independence Finance, Capital Expenditure Allocation.

Pendahuluan

Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana otonomi daerah merupakan isu strategis konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia. Tujuan yang paling penting dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah terutama dalam mengatur pembangunan daerahnya sendiri (Suandi, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah saat ini secara teknis berpedoman pada

Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perbedaan yang cukup signifikan dengan Permendagri No.29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjadi pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sebelumnya. Perbedaan tersebut salah satunya adalah dalam Permendagri No.29 tahun 2002 pada struktur belanjanya

menggunakan istilah belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik yang masing-masing dirinci menjadi kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, sedangkan pada Permendagri No.13 tahun 2006, belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja tidak terduga, dan belanja langsung yang dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Hardiningsih dan Rachamawati, 2013).

Belanja modal yang diperuntukkan dalam penyediaan fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan dan prasarana umum lainnya adalah menjadi tanggungjawab dan merupakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki layanan publik, sehingga dapat disimpulkan, bahwa alokasi belanja modal yang besar menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas publik.

Perilaku pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah akan berpengaruh dalam proses penganggaran daerah. Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, terutama jika melihat pada porsi belanja modal. Ditinjau dari perspektif teori keagenan, masalah-masalah keagenan dapat muncul dalam proses penganggaran publik, baik itu masalah antara pemerintah daerah dengan legislatif (DPRD) maupun masalah antara legislatif dengan publik. Munculnya permasalahan keagenan tersebut adalah wajar dalam konteks hubungan antara agen dengan prinsipal, namun diharapkan masalah tersebut didasari oleh altruisme semata untuk kemajuan daerah, pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas, sehingga kinerja keuangan yang baik akan berpengaruh pada struktur anggaran yang

condong pada pembangunan daerah (Hidayat, 2013).

Alokasi belanja modal yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diformalkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam setiap tahun. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi keuangan seperti PAD, total belanja, capaian realisasi, dana perimbangan. Pemerintah daerah yang mempunyai kondisi keuangan yang sehat tentunya akan mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk mengalokasikan sumber dayanya kedalam belanja, sehingga kemungkinan akan menetapkan alokasi belanja modal yang lebih besar, dan sebaliknya apabila kondisi keuangan pemerintah daerah kecil, kemungkinan untuk mengalokasikan kedalam belanja modal juga akan kecil.

Porsi belanja modal pada tahun 2012 yang dihitung dari rasio belanja modal yang tertinggi terdapat di kota Surabaya yaitu sebesar 27,93% dan yang terkecil dikabupaten Ngawi sebesar 12,64% sedangkan nilai rata-rata sebesar 18,70%. Dilihat dari hal tersebut, menunjukkan bahwakondisi rasio belanja modal sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Timur masih menganggarkan belanja modal dengan porsi yang kecil, yaitu dibawah rata-rata, ini berarti bahwa sebagian daerah masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, apalagi dengan munculnya Permendagri No.27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2014, dimana disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.

Sularso dan Restianto (2011) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan, dan alokasi belanja

modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada objek penelitian dan jenis variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah pemerintah kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dan analisis data menggunakan analisis data panel untuk periode satu tahun yaitu tahun 2012. Variabel independen mencakup derajat desentralisasi, efektifitas PAD dan kemandirian keuangan daerah.

Permasalahan

Berdasarkan atas latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
2. Apakah efektifitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
3. Apakah kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Agency Theory dalam Organisasi Pemerintah

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul saat pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen, dimana agen tidak mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*,

tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Perilaku oportunistik legislatif dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. Melalui *discretionary power* yang dimilikinya, legislatif dapat mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi legislatif. Sebagai agen bagi pemilih, perilaku oportunistik legislatif lebih kelihatan jelas. Dalam penganggaran, legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan mengakomodasikan kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan melakukan penjarangan aspirasi masyarakat (Halim dan Syukriy, 2006).

Dalam penelitiannya tersebut, Halim dan Syukriy (2006) mengatakan bahwa eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislatif (asimetri informasi). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan

baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaiknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung *slack* seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. *Slack* tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penelitian Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah diproksikan dengan derajat desentralisasi, efektifitas PAD dan kemandirian keuangan. Derajat desentralisasi yang dimaksud adalah rasio yang mengukur derajat kontribusi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan asli Daerah (PAD) itu sendiri, sehingga dalam penelitian ini indikatornya adalah PAD dibagi total pendapatan daerah.

Diberlakukannya UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu cara penyempurnaan sistem desentralisasi fiskal. Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD (Ahmad, 2006). Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menopang APBD secara keseluruhan. Waluyo (2007) melakukan penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia, hasilnya dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berdampak positif maupun negatif.

Dari pemaparan di atas hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : *Derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal*

Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002).

Solikin (2007) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif yang kuat antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal, dan hasil ini diperkuat oleh penelitian Daryanto dan Yustikasari (2007) yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

H2 : *Efektifitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.*

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan, yang berarti akan terdapat perubahan juga di setiap pos belanja, termasuk belanja modal. Menurut Waluyo (2007), idealnya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan PAD sehingga daerah benar-benar otonom, tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Kusnandar dan Siswanto (2007) membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Walaupun persentase PAD cukup kecil terhadap total pendapatan, yaitu sekitar 5-7%, namun sangat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini juga didukung oleh Darwanto dan

Yustikasari (2007) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif.

Dari pemaparan di atas diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H3 : *Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.*

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik, kemudian menjelaskan fenomena atau kejadian dengan menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur, dan teknik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana kriteria yang telah ditetapkan Keterangan :

Notasi	Definisi Variabel	Satuan
ABM	Realisasi Belanja Modal per Total Belanja	%
DD	Realisasi PAD per Total Pendapatan Daerah	%
EF	Realisasi PAD per Target PAD	%
KK	Realisasi PAD per Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman	%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

adalah data yang lengkap sesuai variabel yang diteliti selama tahun pengamatan.

Adapun kriteria yang ditentukan peneliti dalam pengambilan sampel adalah: 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyusun LKPD dan diaudit oleh BPK. 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang menyediakan data untuk pengukuran variabel dalam penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, sedangkan sumber datanya diperoleh dari LKPD tahun 2012 yang didapat dari pusat informasi dan komunikasi BPK dalam website resminya di www.bpk.go.id.

Model penelitian terdiri dari 3 variabel independen, yaitu derajat desentralisasi, efektif PAD dan kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel dependen hanya satu tahun saja, yaitu tahun 2012.

$$ABM = \alpha + \beta_1 DD + \beta_2 EF + \beta_3 KK + \varepsilon$$

Berdasarkan pengujian dengan statistik, berikut disajikan hasil data penelitian ini.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DD	38	5,10	49,20	11,18	8,00
EF	38	97,37	183,23	116,47	14,29
KK	38	5,58	159,07	15,02	24,31
ABM	38	15,44	27,93	19,05	2,54
Valid N (listwise)	38				

DD: Derajat Desentralisasi, EF: Efektivitas PAD, KK: Kemandirian Keuangan, ABM : Alokasi Belanja Modal

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasar hasil uji deskripsi statistik pada tabel 1 di atas variabel rasio derajat desentralisasi yaitu rasio yang

menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mempunyai nilai minimum sebesar 5,10% yang dimiliki oleh

Kabupaten Ngawi, nilai maksimum 49,20% dimiliki oleh Kota Surabaya, nilai mean sebesar 11,18% dengan standar deviasi 8,00, oleh karena nilai mean lebih besar dari standar deviasi maka penyebaran data pada variabel derajat desentralisasi merata (homogen).

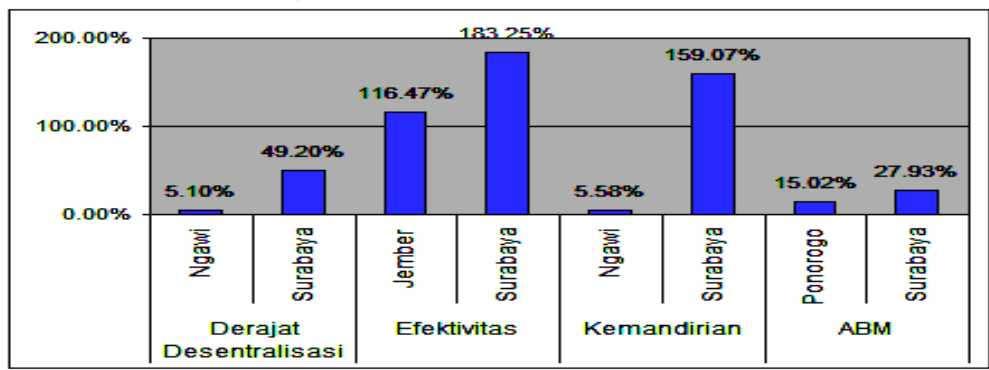
Variabel rasio efektivitas PAD yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, rasio ini mempunyai nilai minimum sebesar 97,37% yang dimiliki oleh Kota Surabaya, nilai maksimum sebesar 183,23% yang dimiliki oleh Kabupaten Jember, nilai mean sebesar 116,47 dengan standar deviasi sebesar 14,29 yang berarti penyebaran data variabel efektivitas PAD merata (homogen).

Variabel rasio kemandirian keuangan daerah mempunyai nilai minimum sebesar 5,58% yang dimiliki oleh Kabupaten Ngawi, nilai maksimum sebesar 159,07% dimiliki

oleh Kabupaten Surabaya. Nilai mean rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 15,02% dengan standar deviasi sebesar 24,21 yang berarti penyebaran data variabel kemandirian keuangan daerah yang dijadikan sampel tidak merata penyebarannya (heterogen).

Variabel alokasi belanja modal daerah Jawa Timur yang paling kecil dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo yaitu sebesar 15,44%, sedangkan belanja modal yang terbesar dimiliki oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 27,93%. Nilai rata-rata alokasi belanja propinsi Jawa Timur yang terdiri dari kabupaten dan kota adalah sebesar 19,05%, sedangkan nilai standar deviasi yang didapat dari perhitungan statistik sebesar 2,54 yang berarti penyebaran data variabel alokasi belanja modal pada penelitian ini merata (homogen).

Hasil deskriptif nilai rata-rata secara keseluruhan variabel penelitian dapat dibuat grafik sebagai berikut.



Gambar 1. Perbandingan Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal

Gambar 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja keuangan terdapat perbedaan yang jauh berbeda antara kabupaten dan kota di Jawa Timur. Meskipun terjadi perubahan kebijakan desentralisasi, implementasi desentralisasi fiskal di propinsi Jawa Timur hingga saat ini cenderung belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Jika dilihat dari indikator kinerja keuangan daerah antara kota dan kabupaten. Kota Surabaya rata-rata mempunyai indikator kinerja keuangan

jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah kabupaten. Bahkan sampai alokasi anggaran belanja jauh lebih besar peningkatannya. Hal ini dimungkinkan rendahnya pendapatan perkapita masyarakat di daerah kabupaten dimana kemampuan keuangan daerah masing-masing berbeda satu sama lain. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan kemampuan daerah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang ada, baik penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun penerimaan

yang berasal dari pungutan-pungutan di daerah.

Analisis Regresi

Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda (*multiple regression*), yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel terikat

dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal dan diprediksikan dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Derajat Desentralisasi (DD), Efektifitas PAD (EF) dan Kemandirian Keuangan (KK). Hasil persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Signifikansi	Kesimpulan
Constanta	6,407			
DD	0,124	2,125	0,041**	Ha diterima
EF	0,091	5,225	0,000*	Ha diterima
KK	0,041	2,084	0,045**	Ha diterima
F hitung	24,743			
F Prob	0,000			
R ²	0,686			
Adjusted R ²	0,658			

Sumber : data sekunder yang diolah

*Signifikansi 1%

**Signifikansi 5%

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diestimasikan antara desentralisasi fiskal terhadap alokasi biaya modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap alokasi belanja modal. Hasil studi ini mendukung temuan empiris Sasana (2009), Martinez (2001), Dartanto (2003).

Desentralisasi fiskal dengan transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah/kota untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada memberi efek positif terhadap alokasi belanja daerah. Temuan ini juga mendukung hasil penelitian Sasana (2009), hasil studi disimpulkan bahwa, desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil studi ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal Oates (1993). Menurut Oates desentralisasi fiskal akan

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Menurut Oates (1993) daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memuaskan kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

Desentralisasi fiskal hasil penelitian ini juga memberikan hasil bahwa rasio efektivitas PAD dan kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari kedua rasio tersebut memiliki peran yang signifikan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. Kinerja keuangan daerah dalam kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebijakan daerahnya sendiri

memberikan gambaran yang positif dengan adanya tingkat kemandirian daerah, dimana ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat alokasi belanja modal daerah diprovinsi Jawa Timur. Rasio kemandirian ini akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tinggi di daerah tersebut. Dengan PAD yang tinggi ini akan memberikan perkembangan yang pesat karena daerah akan lebih maju dan berkembang perekonomiannya, sehingga akan mempengaruhi alokasi biaya modal.

Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) menyebutkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan secara tidak langsung dengan belanja modal daerah sebesar 12,3% dan kemandirian keuangan sebesar 8,6%. Sedangkan dalam penelitian ini pengaruh efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal sebesar 9,10% dan kemandirian keuangan sebesar 4,10%. Hal ini terjadi karena pemerintah yang masih kurang tanggap dalam pengelolaan anggaran yang ada dan belum dapat mengelola daerahnya sendiri secara optimal. Apabila pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara bersama-sama menjalankan tugas dan mengaplikasikan kebijakan yang sesuai dengan desentralisasi fiskal, maka APBD bisa tepat sasaran dan kinerja keuangan daerah semakin baik.

Rasio efektivitas merupakan rasio derajat keberhasilan yang didapat dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Apabila daerah tersebut mampu merealisasikan peningkatan PAD dengan pelayanan masyarakat yang optimal maka rasio efektivitas akan tinggi. Derajat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola anggaran maupun mengelola potensi yang terdapat di daerah tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan perekonomian di daerah itu semakin berhasil dalam mencapai target yang diinginkan atau semakin efektif, maka seharusnya perkembangan perekonomian

akan meningkat sehingga hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, rasio efektivitas memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal daerah sebesar 9,1%. Ini membuktikan bahwa rasio efektivitas masih berkontribusi terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, dan sebaliknya. Faktor penentu efektivitas menurut Budiarto (2007) dalam Hamzah (2008) antara lain, yaitu *pertama*, faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan. *Kedua*, faktor struktur organisasi yang merupakan susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional. *Ketiga*, faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan. *Keempat*, faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat. *Kelima*, faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut ke dalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara kinerja pemerintah daerah yang diprosikan dengan derajat desentralisasi, efektivitas pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal di pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh provinsi Jawa Timur pada tahun 2012. Berdasarkan hasil uji empiris yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Hampir 70% rasio PAD terhadap

Total Pendapatan Daerah berada pada kisaran kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan kontribusi PAD yang kecil terhadap total pendapatan daerah, namun dalam penelitian ini bisa mempengaruhi terhadap alokasi belanja modal, dimana hal ini dimungkinkan karena adanya masalah keagenan antara pihak eksekutif, yaitu pemerintah daerah dan pihak legislatif atas alokasi belanja modal.

Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila mencapai minimal 1 atau 100%. Dilihat dari rasio efektivitas PAD, 99% berada di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sudah bisa memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga bisa mempengaruhi dan mengalokasikan sebagian PAD-nya untuk belanja modal.

Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Semakin tinggi pendapatan asli daerah mencerminkan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah tersebut, sehingga tidak selalu tergantung kepada dana bantuan berupa transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk menjalankan kegiatan pemerintahannya.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

1. Data LKPD yang digunakan adalah LKPD pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah diaudit oleh BPK dengan semua hasil opini auditnya, sehingga kewajaran masing-masing laporan keuangan pemerintah daerah masih dipertanyakan.
2. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah berupa angka-angka secara kuantitatif, sehingga hasil ini masih

belum menunjukkan makna substantifnya.

3. Pengaruh variabel independen ke dependen adalah pada satu tahun yang mungkin sebenarnya akan berpengaruh di tahun berikutnya.

Saran

Saran dan implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa memisahkan LKPD berdasarkan opini audit sebagai sampelnya, sehingga obyek penelitiannya juga sebaiknya diperluas
2. Diharapkan dalam mengkaji hasil penelitian bisa lebih luas, yaitu mengkaji hasil secara substantifnya, bukan hanya sebatas administratif saja, serta meneliti faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya belanja modal.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dengan memperluas waktu penelitian (3-5 tahun), sehingga hasil yang didapatkan lebih bisa mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan porsi belanja modal sebagaimana diamanatkan dalam kemendagri bahwa alokasi belanja modal minimal 30% dari belanja modal, sehingga komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik bisa terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdullah, Sukriy & Abdul, Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2 (2) : 17-32
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Adi. P.H. 2007. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Vol. 08. No.1.
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Darmayasa, Nyoman. 2014. Pengaruh DAU, PAD, dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi 3. Padang, Politeknik Negeri Padang 12-14 Juni 2014
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan IV Penerbit UNDIP
- Hadi Sasono, 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi pembangunan Vol. 10, No.1, Juni, hal. 103 – 124.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Kompak. STIE YO. Yogyakarta.
- Hendarmin 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012 hal 144 – 155
- Hidayat, Syarif, 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspective on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta, Rajawali Pers.
- limi, Atsushi, 2005. *Decentralization and economic growth revisited: an empirical note. Journal of Urban Economics 57.*
- Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2008-2012). *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, Manado, 25-28 September 2013
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Dhatmika, Ketut Wahyu dan Hastarini Dwi Atmanti (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*. Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013.
- Kusnandar, & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV.*
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Panduan bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. H.128-130
- Malik, Shahnawaz, dkk, 2006. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan. The Pakistan Development Review*, 45: 4 part ii (Winter 2006).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andhi.
- Martinez-Vasquez, Jorge and Robert M. McNab. 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*. International Studies Program Working Paper. Atlanta: Andre Young School of Policy Studies, Georgia State University
- Oates, W, 1993, *Fiscal Decentralization and Economic Development, National Tax Journal*, XLVI. 237-243.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.

- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik)*. Malang: Averroes Press.
- Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sularso, Restianto, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi*. Vol.1 No.2. Agustus 2011.
- Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan; Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Fanani, Zaenal, Sri Ningsih dan Hamidah, 2011, Faktor-Faktor Penentu Kualitas Pelaporan Keuangan dan Kepercayaan Investor, *SNA XII tahun 2011*
- Ningsih N, Razak A dan Indar. 2011. Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
- Teguh Dartanto dan Bambang PS Brodjonegoro, 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan, *Indonesian Journal of Economics and Development*, Vol.4 No.1 Juli 2003. Hal. 17-37. Jakarta: FE UI
- Todaro, MP. 1997. *Economic Development. Sixth Edition*. Published by New York University.
- Xie, D., Zou, H., dan Davoodi, H., 1998. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States*. *Journal of Urban Economics XLV:228-39*.
- Zhang Tao dan Zou Heng fu. 1998. *Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China*. *Journal of Public Expenditure* 67, 221- 240